

**MASA DEPAN REUNIFIKASI KOREA**  
**(Dinamika Hubungan Korea Utara-Korea Selatan dan Dampaknya Terhadap Stabilitas**  
**Keamanan di Kawasan Asia Timur**  
**Pasca Perang Dingin)**

Oleh  
**Mega Aldikawati**

**ABSTRAK**

Dinamika hubungan Korut dan Korsel mempengaruhi konstataasi dan konstelasi politik, termasuk stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur. Kedua Korea melakukan interaksi dan kerjasama dengan Jepang, Cina, Amerika, dan Rusia yang mempunyai keterkaitan dengan pecahnya Korea menjadi dua pada masa Perang Dingin. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik studi pustaka untuk menganalisa dinamika hubungan antar-Korea serta prospek dan masa depan reunifikasi Korea. Masa depan reunifikasi Korea tidak hanya dipengaruhi oleh kedua Korea, namun juga dipengaruhi oleh politik luar negeri Jepang, Cina, Amerika, dan Rusia terhadap Semenanjung Korea. Dalam tingkat internal, regional, dan global, skenario ‘*Unification by Consensus*’ atau reunifikasi dengan ‘konsensus’ dapat mewujudkan reunifikasi damai.

Kata kunci : Kepentingan Nasional, Keamanan Regional, Asia Timur, Konflik, Reunifikasi Korea.

**ABSTRACT**

**The Prospect of Korean Reunification**  
**(Dynamics of Inter-Korean Relations and Its Impact to East Asia’s**  
**Regional Security Stability in Post-Cold War Era)**

*East Asian constataion and constellation, includes regional security stability are influenced by dynamics of inter-Korean relations. Two Koreas have been interacting and cooperating with Japan, China, United States, and Russia whom has linkage with the Korean ruptures in Cold War era. This research is using descriptive qualitative research method with literature and library research as research technic for researching and analyzing inter-Korean dynamics and Korean reunification prospect in the future. The prospect of Korean reunification will not be influenced by both Koreas per se, but also will be influenced by foreign policies of Japan, China, United States, and Russia to Korean Peninsula. In three level explanations; internal, regional, and global, ‘Unification by Consensus’ or reunification with ‘consensus’ can actualize ‘peace reunification’.*

*Keywords : National Interest, Regional Security, East Asia, Conflict, Korean Reunification.*

## **A. PENDAHULUAN**

### **1. Latar Belakang Masalah**

Perang Dingin yang terjadi tidak lama setelah berakhirnya Perang Dunia II merupakan perang besar paruh kedua abad 20 yang membentuk dunia sekarang ini (Maansbach dan Rafferty 2012,181). Perang Dingin merupakan sebuah periode dimana terjadi konflik, ketegangan dan kompetisi antara Amerika Serikat (Blok Barat) dan Uni Soviet (Blok Timur) yang terjadi antara tahun 1945-1991. Dalam konflik ini, Amerika Serikat dan Sekutu (kapitalisme) terlibat perang ideologi melawan Uni Soviet (komunisme). Akibatnya terjadi berbagai konflik di berbagai belahan dunia dimana Amerika dan Uni Soviet bertemu dan bersaing memperebutkan pengaruh, terutama di Asia, khususnya di Semenanjung Korea.

Sebelum Perang Dunia II, Korea pernah menjadi bagian dari wilayah Kekaisaran Jepang sebagai negara protektoratnya semenjak tahun 1905 saat Jepang memaksa Korea menandatangani Perjanjian Eulsa dan menganeksasi Korea pada tahun 1910. Masa pendudukan Jepang berakhir ketika Jepang menyerah kepada Sekutu pada akhir Perang Dunia II tahun 1945 yang mengharuskan Jepang meninggalkan Korea. Berakhirnya pemerintahan kolonial Jepang di Korea membawa Korea menuju era baru dimana diawali dengan Amerika dan Uni Soviet membagi Korea menjadi dua wilayah administratif yang pada awalnya untuk mengawasi penarikan pasukan Jepang dari Korea. Bagian Utara dipegang oleh Uni Soviet dan bagian Selatan dikuasai oleh Amerika. Namun, Perang Dingin membuat Uni Soviet dan Amerika menganggap Semenanjung Korea strategis bagi persaingan penyebaran ideologi mereka. Korea Utara (Korut) didukung Uni Soviet dan Cina dengan ideologi komunis, sedangkan Kor Selatan (Korsel) didukung Jepang dan Amerika Serikat dengan ideologi kapitalis. Semenjak saat itu, Semenanjung Korea terpecah menjadi dua negara yang saling tidak mengakui keabsahan pemerintahan satu dan lainnya. Kemerdekaan Korea pada waktunya yang dijanjikan oleh Amerika dan Uni Soviet tidak terjadi dan Perang Korea pun pecah pada 25 Juni 1950 sampai ditandatangani Perjanjian Gencatan Senjata pada 27 Juli 1953.

Vietnam dan Jerman yang dulunya juga pernah terbagi dua akibat Perang Dingin telah kembali bersatu. Sedangkan, Semenanjung Korea sampai saat ini masih terbagi menjadi dua. Padahal, Perang Dingin yang melatarbelakangi pecahnya perang Korea dan membagi Korea sudah selesai, begitu juga Uni Soviet sebagai tokoh utama bagi keberadaan Korut sudah

runtuh pada tahun 1991. Walaupun Perang Dingin sudah usai, reunifikasi Korea masih sulit dilakukan, mengingat jika reunifikasi terjadi, tentu akan ada perdebatan mengenai ideologi mana yang akan dipakai serta akan ada friksi dalam sistem pemerintahan dan kehidupan sosial di masyarakat Korea. Selain pertentangan mengenai ideologi, keberadaan Cina juga dapat dianggap sebagai '*senjata*' untuk mencegah keberadaan langsung Amerika di Asia Timur, karena secara geografis, Semenanjung Korea berbatasan langsung dengan daratan Cina. Di sisi lain, Cina juga ingin memastikan pengaruh Amerika tidak meluas hingga ke Korut yang berbatasan langsung dengan negaranya.

Keberadaan Cina dan Jepang berada dalam satu kawasan dan secara geografis berdekatan namun mempunyai persepsi dukungan berbeda terhadap dua Korea menambah dinamika hubungan dua Korea yang akan berdampak pada stabilitas kawasan di Asia Timur, khususnya stabilitas keamanan dan masa depan Semenanjung Korea. Sedangkan, Rusia dan Amerika yang secara geografis tidak dekat dengan Semenanjung Korea juga mempunyai pengaruh terhadap dinamika hubungan antar-Korea. Hubungan sejarah antara Rusia sebagai Uni Soviet saat Perang Dingin dengan sekutunya Cina pada saat itu serta Amerika yang mempunyai pangkalan militer di negara sekutu, Jepang serta Korsel membuat konflik antara dua Korea ini tidak hanya menjadi konflik bilateral saja, melainkan juga konflik regional serta internasional karena berbagai pihak yang terlibat dalam konflik ini tidak hanya dari dua Korea itu sendiri.

## **2. Permasalahan Penelitian**

Asia Timur adalah kawasan yang strategis dengan negara penghuni yang perkembangan ekonomi dan industrinya paling maju di Asia dan dunia. Rumitnya hubungan Jepang, Cina, Korut, dan Korsel di kawasan mengakibatkan sulitnya mencapai stabilitas keamanan, terlebih hadirnya Amerika Serikat dan Rusia di kawasan. Semenanjung Korea tetap menjadi perhatian keamanan strategis dan objek kompetisi pengaruh di Asia Timur. Sehingga, upaya reunifikasi Korea dalam dinamika hubungan antar-Korea semakin kompleks. Dari permasalahan yang dipaparkan, maka dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan penelitian adalah;

1. Bagaimana dinamika hubungan bilateral antara Korut dan Korsel serta dampak dari hubungan keduanya tersebut terhadap stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur pasca Perang Dingin?
2. Bagaimana masa depan reunifikasi antara Korut dan Korsel?

### **3. Tingkat Analisa**

Tingkat analisa dalam studi hubungan internasional menurut Mohtar Mas'ood yaitu Analisa Individu/Kelompok, Negara-Bangsa, dan Sistem Regional-Global (Mas'ood 1990,40). Tingkat analisa yang digunakan dalam penelitian ini;

#### **1. Negara dan Bangsa**

Tingkat analisa Negara dan Bangsa menjelaskan perilaku, pengelolaan konflik dan hubungan bilateral Korut dan Korsel. Analisa pengaruh politik luar negeri Jepang, Cina, Rusia dan Amerika terhadap isu Korea.

#### **2. Sistem Regional dan Global**

Tingkat analisa sistem regional menjelaskan karakteristik kawasan Asia Timur dan perilaku, kepentingan, dan strategi Jepang dan Cina dalam hubungan kerjasama regional serta pengelolaan konflik mengenai isu Korea. Sedangkan, tingkat analisa global menganalisa perilaku, kepentingan dan strategi kebijakan Amerika Serikat dan Rusia sebagai negara luar kawasan Asia Timur yang berperan dalam konflik Korea terhadap kawasan Asia Timur mengenai isu Korea.

### **4. Kerangka Teori**

#### **1. Kepentingan Nasional**

Kepentingan nasional merupakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai atau dipenuhi oleh suatu bangsa. Memelihara rezim ekonomi-politik merupakan salah satu tujuan dari kepentingan nasional karena dianggap sebagai identitas politik bangsa. Setiap negara tidak akan membiarkan identitas politiknya dipengaruhi oleh negara lain. Maka dari itu, mempertahankan rezim ideologi dan ekonomi-politik merupakan salah satu tujuan dari kepentingan nasional (Mas'ood 1990,141). Setiap negara juga mempertahankan integritas teritorialnya karena tidak ada negara yang ingin kedaulatan negaranya dilanggar oleh negara lain.

Kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara (Sitepu 2011,163). Politik luar negeri merupakan

perangkat formula nilai, sikap, arah serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional di dalam percaturan dunia internasional (Perwita dan Yani 2006,47). Morgenthau mengatakan bahwa untuk mencapai kepentingan nasional tersebut seorang pemimpin negara bisa memunculkan politik-politik yang bersifat kooperatif dan konflikatif yang spesifik seperti perlombaan senjata, *balance of power*, bantuan luar negeri, aliansi-aliansi, subversi, “perang” propaganda dan “perang” ekonomi (Couloumbis dan Wolfe 1990,115). Hal ini mengakibatkan perlombaan pencapaian kepentingan diantara kedua negara berdampak pada negara-negara lain di kawasan. Kondisi kawasan sangat terkait dengan reaksi tiap-tiap negara di kawasan untuk melindungi diri dari situasi yang tak menentu di kawasannya sehingga akan mempengaruhi stabilitas keamanan regional.

## 2. Kawasan

*Region* atau kawasan diartikan sebagai sekumpulan negara yang memiliki kedekatan geografis karena berada dalam suatu wilayah tertentu (Snyder 2008,228). Sedangkan regional merupakan dua atau lebih negara yang secara geografis letaknya berdekatan. Region internasional merupakan kumpulan sejumlah negara yang dihubungkan atas dasar kondisi geografis dan ketergantungan bersama (Nye 2002,11). Kedekatan geografis perlu didukung adanya kesamaan budaya, keterikatan sosial dan sejarah yang sama (Hettne dan Soderbaun 2002,39). Aspek geopolitik penting dalam politik dunia. Geopolitik adalah teori yang tidak didasarkan atas ilmu pengetahuan (*pseudoscience*) yang menjadikan faktor geografi sebagai hak mutlak yang mestinya menentukan kekuatan dan selanjutnya nasib negara (Morgenthau 2010,90).

Dalam perspektif realisme, regionalisme dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip realis. Realis memandang negara adalah aktor utama dalam hubungan internasional yang anarki. Struktur anarki adalah dimana negara-negara mempunyai kedaulatan dan kekuasaan tertinggi ada di tangan mereka dan tidak mengenal kekuasaan lebih tinggi di atas mereka (Hara 2011,36). Namun, perkembangan yang memperlihatkan bahwa antar negara yang memiliki kedekatan geografis saling berinteraksi dan kerjasama, muncul neorealisme untuk menjelaskan anomali tersebut.

Ada dua hal utama yang berkontribusi dalam menumbuhkan regionalisme di suatu kawasan bagi neorealisme (Suparman, Silvy, dan Sudirman 2010,40-45). Tekanan sistem internasional secara politis dan ekonomis merupakan faktor pertama. Negara-negara akan saling melakukan tawar-menawar untuk melakukan koordinasi strategi dan berupaya mencari

kesepakatan mengenai tujuan-tujuan bersama berdasarkan tujuan tertentu meski dengan kepentingan nasional yang berbeda. Faktor kedua adalah peran dan fungsi hegemoni. Neorealis menyoroti proses integrasi yang dikendalikan langsung oleh desakan dan tekanan Amerika. Negara hegemon mendorong regionalisme yang membentuk kelompok-kelompok sub-regional yang berkembang sebagai respon terhadap keberadaan hegemon dan cenderung sebagai upaya untuk *balance of power* melawan suatu negara hegemon.

### **3. Keamanan Regional**

Pasca Perang Dingin, keamanan tidak lagi diartikan secara sempit sebagai hubungan konflik atau kerjasama antar-negara semata, tetapi juga berpusat pada keamanan untuk masyarakat (Perwita dan Yani 2006,119). Keamanan regional merupakan keadaan yang penting untuk diciptakan dalam sebuah kawasan karena merupakan elemen pembentuk dari keamanan internasional maupun konflik internasional (Kriesberg 1994,155). Hal ini karena kawasan saling berhubungan dengan negara-negara di luar kawasan sehingga interaksi tersebut menimbulkan potensi konflik. Keamanan regional merupakan hal pertama yang perlu diupayakan demi terciptanya stabilitas keamanan internasional karena keamanan regional sangat berhubungan dan mempengaruhi keamanan nasional sebuah negara yang terletak di dalam kawasan yang bersangkutan (Buzan 1991,187). Ancaman dapat mengganggu keamanan regional yang dapat menimbulkan potensi konflik, namun disisi lain, ancaman dapat menciptakan kerjasama regional antar negara-negara kawasan untuk menghilangkan ancaman tersebut demi menghindari konflik dan menciptakan stabilitas keamanan regional.

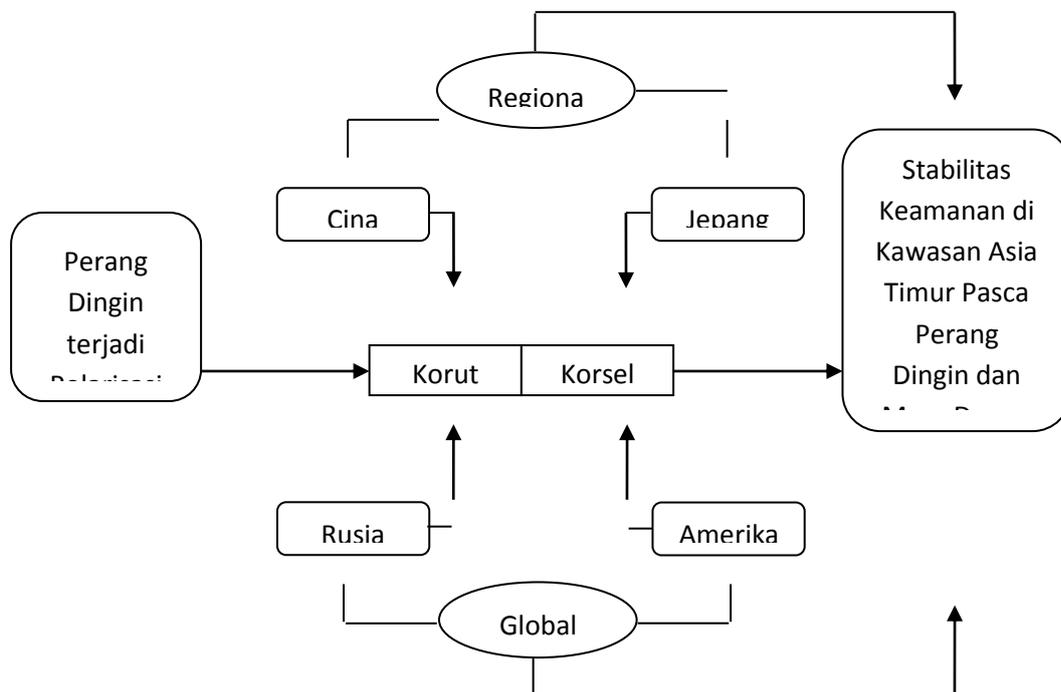
### **4. Konflik dan Resolusi Konflik**

Di dalam hubungan internasional, negara akan melakukan interaksi dengan negara lainnya, salah satunya berupa kerjasama. Namun hasil interaksi hubungan internasional tidak selalu positif, ada kemungkinan berkembang ke arah negatif dan menjadi konflik. Konflik terjadi dilatarbelakangi oleh kombinasi khusus para pihak, pandangan yang berlawanan mengenai suatu isu, sikap bermusuhan, dan tipe-tipe tindakan diplomatik dan militer tertentu (Holsti 1988,169). Setiap negara mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan kepentingannya. Konflik timbul manakala terjadi friksi antar negara karena tujuan dan tindakan mereka dalam mencapai kepentingan nasional berbeda dengan keinginan pihak lainnya.

Dalam mengatasi ataupun menghadapi konflik dibutuhkan sebuah cara untuk mengakhiri atau menemukan titik temu dalam masalah. Menurut John Burton (1999), resolusi konflik adalah proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan suatu proses analisis dan penyelesaian masalah yang mempertimbangkan kebutuhan-kebutuhan individu dan kelompok. Tujuan utama dari resolusi konflik adalah bagaimana mengubah dinamika konflik dari yang kompetitif menjadi yang lebih kooperatif (Sukanta 2007,20).

Ada tiga prosedur pokok untuk mengatur kompromi dan keputusan (Holsti 1988,185). Negosiasi, perundingan bilateral atau multilateral di antara para pihak yang terlibat langsung. Mediasi, proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator. Keputusan, dimana suatu pihak independen memutuskan suatu penyelesaian melalui jenis imbalan tertentu. Tak jarang penyelesaian konflik harus melibatkan pihak ketiga untuk menengahi dan mencari jalan keluar, baik menggunakan negara lain maupun organisasi regional dan internasional.

### 5. Kerangka Analisa



Perang Dingin menciptakan polarisasi yaitu perpecahan kekuatan internasional menjadi dua (bipolar), yaitu Amerika dan Uni Soviet. Efek polarisasi pada Perang Dingin membuat kedua negara bersaing melakukan penyebaran pengaruh ideologi dengan

propaganda politiknya. Salah satu hasilnya adalah perpecahan Korea menjadi dua yaitu Korut dan Korsel. Dinamika hubungan antara Korut dan Korsel membentuk pola dukungan negara-negara sekitarnya di kawasan Asia Timur, Cina mendukung Korut dan Jepang mendukung Korsel. Pola dukungan tersebut juga terjadi secara global dimana Amerika yang bersekutu dengan Jepang mendukung Korsel, sedangkan Rusia, sebagai negara bekas Uni Soviet yang dahulunya bersekutu dengan Cina mendukung Korut. Pola dukungan akibat polarisasi Perang Dingin mengakibatkan konflik bilateral antara Korut dan Korsel berkembang menjadi konflik regional dan internasional. Sehingga perkembangan konflik antar-Korea pasca Perang Dingin mempengaruhi stabilitas keamanan kawasan Asia Timur dan masa depan reunifikasi Korea.

## **6. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif dan dilakukan dengan teknik studi pustaka untuk menganalisa dan menjawab permasalahan penelitian.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Konstataasi dan Konstelasi Asia Timur**

Asia Timur merupakan wilayah geografis sub-regional dari benua Asia. Perubahan situasi keamanan dan politik di dunia berubah ketika Perang Dingin berakhir, khususnya di Asia Timur. Asia Timur menjadi sebuah kawasan yang mempunyai peranan penting dalam hubungan internasional. Kawasan Asia Timur merupakan kawasan yang rentan dengan konflik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Untuk konflik antar-Korea, situasi Semenanjung Korea terkait dengan sejarah panjang Jepang-Amerika Serikat dan Cina-Rusia sebagai titik poros geopolitik dunia saat ini, khususnya di Asia Timur. Asia Timur merupakan kawasan dimana negara-negara bersaing untuk membentuk kembali geometri kekuatan global bahkan disaat yang bersamaan ketika mereka berusaha menyelesaikan masalah bilateral dan regional (Rozman 2004,17).

Kenyataan bahwa Semenanjung Korea terbagi menjadi dua, *four great powers* tidak dapat mengabaikan ancaman maupun peluang regional Asia Timur tanpa mengindahkan hubungan antar-Korea yang sekilas merupakan hubungan internal padahal Semenanjung Korea merupakan bagian dari politik kekuatan-kekuatan besar (Armstrong 2006,167). Hal tersebut terlihat dari historis terpecahnya Korea menjadi dua yang melibatkan dua negara

hegemoni ketika Perang Dingin, yaitu Amerika dan Uni Soviet (Rusia). Geografi merupakan elemen dalam pertimbangan kebijakan luar negeri setiap negara dan ini merupakan faktor penting pertimbangan kebijakan luar negeri *four great powers* terhadap Semenanjung Korea, hal ini dikarenakan Semenanjung Korea sebagai pusat geostrategis kawasan Asia Timur (Armstrong 2006,167).

Pasca Perang Dingin, negara-negara tidak lagi hanya berkonfrontasi secara langsung seperti ketika Perang Dingin dalam hal persaingan ideologi dan sentimen nasionalisme. Kehadiran militer Amerika telah memperkecil potensi sumber konflik dan menjaga keamanan regional dan kesejahteraan (Munakata 2006,1). Namun perkembangan ekonomi Cina yang signifikan mampu membuat Cina menjadi negara yang dapat bersaing dengan Amerika. Sehingga, Cina menjadi *balance of power* Amerika di Asia Timur melalui pengaruh peningkatan ekonominya. Cina, Jepang, Amerika, dan Rusia bersaing untuk menempatkan strategi yang tepat dalam konteks kerjasama maupun kompetisi untuk mengimbangi dan menyaingi rivalnya dalam perebutan pengaruh atau dalam menjaga *status quo* di Semenanjung Korea demi menjaga stabilitas Asia Timur.

## **2. Dinamika Hubungan Korut-Korsel Pasca Perang Dingin**

Charles K. Armstrong mengelompokkan hubungan antar-Korea menjadi empat fase, yaitu; (Armstrong 2005,2-4)

- *Fase Pertama*, hubungan yang berkarakter *zero-sum game* dari saling bertentangan. Fase ini berakhir ketika *Joint Communiqué* 1972, yaitu pertama kalinya kedua Korea melakukan hubungan dan komunikasi resmi. Gebrakan tahun 1972 hubungan antar-Korea tersebut merupakan hasil dari perubahan konfigurasi dinamika Perang Dingin di Asia Timur. Perubahan pada pendekatan hubungan Amerika dan Cina yang keduanya merupakan dua negara besar yang mempengaruhi Korea.
- *Fase Kedua*, periode *dialog on-off* yang memuncak pada ditandatanganinya *Basic Agreement* (Desember 1991) dan *The Agreement on Denuclearization of the Korean Peninsula* (Februari 1992), serta masuknya kedua Korea secara bersamaan ke PBB pada September 1991. Fase ini merupakan perubahan konstansi politik Perang Dingin, termasuk pertumbuhan ekonomi dan hubungan diplomatik antara Korsel dengan negara-negara komunis di Eropa Timur maupun Asia, runtuhnya Uni Soviet, dan berakhirnya Perang Dingin.

- *Fase Ketiga*, ditandai dengan terbukanya Korut terhadap ekonomi eksternal dan kekuatan politik, memuncak pada pertemuan Juni 2000, *Inter-Korean Summit* Presiden Korut Kim Jong-Il dan Presiden Korsel Kim Dae-Jung.
- *Fase Keempat*, hubungan antar-Korea saat ini mengarah ke fase keempat, periode dengan intensitas hubungan ekonomi di Semenanjung Korea yang melewati batas dan meliputi dialog antar-Korea, Rusia, Cina, Jepang, dan Amerika Serikat yang kesemuanya merupakan anggota *Six-Party Talks*.

Korut menjadi satu-satunya negara yang secara geografis langsung dikelilingi oleh *four great powers*, Cina, Rusia, Jepang, Amerika Serikat dan Korsel. Korut merupakan negara miskin yang menderita kelaparan dan kekeringan di masa lalu, sehingga Korut sangat bergantung pada bantuan internasional, khususnya dari Cina dan Korsel (Worth 2008,16). Sehingga, perkembangan ekonomi Korut sangat dipengaruhi dari hubungan eksternalnya. Ekonomi Korut umumnya stagnan akibat sanksi ekonomi internasional karena isu nuklir ditambah struktur ekonomi Korut yang belum stabil (Hwang 2013,171). Sedangkan, Korsel bangkit dari keterpurukan ekonomi dan kerusakan perang serta mampu menjadi negara modern dan berperan dalam dunia internasional. Paham liberalisme yang diterapkan di Korsel mampu menjadikan mereka negara maju berkembang karena keterbukaan kepada dunia internasional. Pada akhir 2012, pendapatan perkapita Korsel 22.590 Dollar AS, dan Korut 1.800 Dollar AS. Jarak pendapatan antara dua Korea akan semakin besar yang mengindikasikan 'biaya beban reunifikasi' akan semakin meningkat semakin lama reunifikasi terjadi (Hwang 2013,172).

Kerjasama ekonomi antar-Korea sudah menjadi elemen penting karena keduanya tertarik dalam kerjasama ekonomi. Korut memiliki bahan baku yang melimpah dan tenaga kerja yang murah, sedangkan Korsel memiliki modal dan teknologi tinggi, sehingga keduanya memiliki struktur ekonomi yang saling melengkapi (Choi 1995,133). Meskipun keduanya dapat memperoleh keuntungan ekonomi dari kerjasama ekonomi antar-Korea, namun keduanya sejauh ini tidak dapat menyatukan itu semua secara substansial. Volume total perdagangan antar-Korea sudah menembus angka miliaran Dollar AS semenjak tahun 2005. Angka tersebut menunjukkan bahwa pasar ekonomi di kedua Korea cukup besar meskipun hubungan politik tidak bersahabat dan perbedaan ideologi pun tidak menjadi penghalang kerjasama ekonomi. Pembentukan komunitas ekonomi antar-Korea akan membantu perekonomian Korut untuk lebih mandiri, sementara kerjasama ini juga akan menguntungkan perekonomian Korsel.

Kim Jong-Un mengeksekusi pamannya, Jang Song-Taek dengan tuduhan sebagai pengkhianat bangsa pada 13 Desember 2013. Padahal Jang sebelumnya adalah orang kepercayaan Kim Jong-Il yang difungsikan sebagai mentor Kim Jong-Un. Jang dinilai sebagai orang terkuat nomor dua setelah Kim Jong-Un. Kantor berita Korut, KCNA mengindikasikan bahwa Jang melihat kematian Kim Jong-Il merupakan kesempatan untuk menantang Kim Jong-Un dan mengambil alih kekuasaan. Jang dipandang sebagai pemimpin utama pendukung reformasi ekonomi sistem *dual economy* seperti Cina dan penghubung penting Pyongyang-Beijing. Walaupun, pada akhirnya Jang dieksekusi, hal tersebut menunjukkan bahwa di dalam pemerintahan Korut terdapat sekelompok orang yang mempunyai visi untuk melakukan perubahan sistem di Korut. Sehingga, sebenarnya ada prospek transformasi Korut yang dapat mewujudkan reunifikasi Korea.

### **3. Isu Keamanan Regional Asia Timur dalam Hubungan Antar-Korea**

Semenanjung Korea merupakan wilayah yang paling keras dan kompleks dalam *balance of power* di Asia Timur. Salah satu alasan utama adalah konfrontasi antara satu negara yang terpecah menjadi dua dan dibawah ideologi, sistem sosial serta pemerintahan yang berbeda di Utara dan Selatan yang merupakan dampak dari Perang Dingin. Kondisi strategis di kawasan Asia Timur telah mengalami perubahan-perubahan, namun tidak secara signifikan. Faktor geopolitik Asia Timur juga sangat mempengaruhi keamanan regional di Asia Timur. Keamanan regional di Asia Timur mempunyai tiga karakter (Ho 2007,30-31). Pertama adalah persaingan dan ketidakpercayaan antara negara satu dengan negara lainnya berdasarkan hubungan sejarah, contohnya Korut-Korsel menjadi negara yang masih terpecah. Kedua, politik regional tidak hanya bergantung pada integritas territorial dan tatanan politik internasional setiap negara melainkan juga bergantung pada memproteksi sistem politik dan pemerintahan masing-masing negara. Ketiga, aliansi menjadi kunci utama strategi keamanan bagi negara-negara di Asia Timur termasuk kehadiran kekuatan militer dan nuklir antara negara-negara aliansi tersebut.

Melalui globalisasi, kawasan Asia Timur menjadi salah satu pusat kekuatan ekonomi dunia. Asia Timur merupakan rumah dari negara peringkat dua (Cina) dan tiga (Jepang) dengan perekonomian terbesar di dunia, serta Korsel yang juga mengalami peningkatan ekonomi. Negara-negara tersebut tidak hanya berkompetisi pada tingkat regional namun juga pada tingkat global. Di regional, kompetisi ketiga negara tersebut dapat dilihat dari faktor geopolitik, yaitu perebutan pengaruh ekonomi di Asia Timur. Mengingat Asia Timur masih

dalam keadaan yang secara politik tidak stabil, persaingan ekonomi tersebut dapat mengarah kepada kebijakan ekonomi-politik terhadap isu Semenanjung Korea.

Korut waspada akan peningkatan militer Korsel dengan ancaman *unification by power* atau *unification by absorption* oleh Korsel dengan kekuatan ekonominya. Oleh sebab itu, Korut melaksanakan kebijakan '*military first*', yaitu kebijakan yang fokus pada peningkatan sumber daya manusia KPA dan menggunakannya untuk mengawal negara dan menentukan kebijakan luar negeri (Jeffries 2013,565). Kebijakan '*military first*' berteriak bahwa kehancuran ekonomi dapat dipulihkan, namun kehancuran militer dapat menghancurkan negara (Kim 2011,11). Menurut Richard Smoke dan Andrei Kortunov (1991:60) bahwa dalam era modern, keamanan tidak dapat diperoleh secara sepihak sehingga keamanan suatu negara tidak dapat dibeli dengan mengorbankan keamanan negara lainnya, bahaya perang nuklir memastikan validitas dalil tersebut (Han 1995,54). Kekacauan internasional dan keakhirannya dalam bencana nuklir merupakan suatu potensial yang murni dan dramatis dalam politik dunia sekarang ini (Morgenthau 2010,416).

Dari negara-negara yang terlibat dan berpengaruh dalam konflik Korea, ada tiga negara yang mempunyai kekuatan senjata nuklir dibawah NPT, yaitu Amerika, Cina dan Rusia. Korut sebelumnya merupakan anggota NPT, namun mengundurkan diri pada 2003 setelah Amerika menuduh Korut melakukan pengayaan uranium. Melihat situasi di Semenanjung Korea yang konfliknya belum berakhir, pengembangan nuklir Korut dianggap sangat mengancam perdamaian karena dapat meningkatkan resiko proliferasi di Asia Timur, jika denuklirisasi Korut gagal maka dapat menyebabkan reaksi berantai dimana Jepang dan Korsel, dan kemungkinan Taiwan juga akan menjadi negara bersenjata nuklir, selain itu juga dapat merusak NPT dalam tingkat global (Weissmann 2009,4).

#### **4. Skenario Reunifikasi**

##### **1. *Unification by Absorption* (Absorpsi)**

Unifikasi oleh penyerapan atau absorpsi satu negara kepada negara lainnya atau diambil alih oleh negara lainnya. *Unification by absorption* ini pernah terjadi oleh Jerman Barat terhadap Jerman Timur yang kemudian berhasil membangun negara Jerman. Dalam hal ini, Korut diambil alih oleh Korsel untuk masuk ke dalam pengaruh, sistem, dan kekuasaan Korsel. Skenario unifikasi ini umumnya dapat terjadi karena runtuhnya Korut. Skenarionya adalah ketika Korut terjadi gejolak

yang menyebabkan tekanan pada rezimnya yang menciptakan ketidakstabilan politik. Sehingga, kondisi nasional Korut memburuk dimana pemerintahan maupun pemimpinnya sudah tidak dapat lagi mengatasi gejolak tersebut, Korsel masuk dengan kekuatan ekonomi dan politiknya untuk mengisolasi rezim pemerintahan Korut. Kemudian, Korsel secara perlahan dapat menguasai Korut dan menjadikannya sebagai bagian dari negaranya dibawah sistem pemerintahan demokrasi Korsel.

Skenario unifikasi ini pernah diungkapkan beberapa kali oleh Presiden Korsel, Lee MyungBak pada tahun 2010 dan 2011 ketika Kementerian Unifikasi Korsel mengajukan proposal perdamaian melalui metode unifikasi oleh absorpsi. Hal ini direspon oleh Korut yang menyatakan bahwa keinginan Korsel tersebut memperburuk hubungan antar-Korea. Salah satu kemungkinan alasan mengapa Presiden Lee begitu percaya diri mengenai prospek reunifikasi Korea adalah pertumbuhan ekonomi Korsel yang semakin kuat dan mampu berada di posisi 15 besar sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia dianggap mampu untuk membiayai Utara dan Selatan jika reunifikasi terjadi.

Skenario ini dapat terjadi jika Korut runtuh dan Korsel-Amerika mengambil alih Korut. Skenario ini berpotensi besar menyebabkan perang militer terbuka akibat ketidakbersediaan Korut untuk menyerahkan wilayah teritorialnya. Selain itu juga akan mengundang intervensi Cina ke Korut. Begitu juga, jika Korsel berhasil menundukkan rezim Korut, beban ekonomi yang ditanggung oleh Korsel akan sangat berat mengingat Korut bukanlah negara yang maju dalam segi infrastruktur dan ekonomi. Sehingga, Korsel akan dituntut untuk membangun Korut sama seperti keadaan infrastruktur ekonominya saat ini untuk menghindari kesenjangan antara Utara dan Selatan. Disamping itu, perbedaan budaya dan transisi sosial akan menjadi tembok penghalang yang sulit diruntuhkan jika kedua negara tersebut bersatu. Doktrin yang dimiliki setiap warga negara masing-masing Korea adalah sentimen yang membenci satu dan lainnya akibat perbedaan pandangan, sentimen historis dan ideologi antar-Korea begitu besar.

Namun, kemungkinan skenario Korut itu sendiri runtuh karena krisis ekonomi yang dapat berdampak pada ketidakstabilan politik dalam negeri sangat sulit terjadi karena Cina tidak akan membiarkan hal tersebut terjadi. Selain sebagai aliansi utama, Cina juga merupakan pemberi bantuan terbesar bagi Korut. Cina tidak akan membiarkan Korut runtuh karena krisis ekonomi dan membiarkan bantuannya

selama ini untuk menjaga Korut tetap berdiri menjadi sia-sia. Kesimpulannya, skenario ini hampir tidak mungkin terjadi dan skenario ini tidak akan dibiarkan terjadi karena dapat memancing konflik internasional yang dapat mengabaikan faktor perdamaian dalam reunifikasi.

## **2. *Unification by Force* (Perang)**

Unifikasi menggunakan kekuatan (*force*) berarti penyatuan dengan peperangan. Skenario unifikasi ini pernah terjadi pada Vietnam. Sebelum bersatu, Vietnam juga terpecah menjadi dua, yaitu Utara (Uni Soviet) dan Selatan (Amerika Serikat). Vietnam Utara yang beraliran komunis menyerang Vietnam Selatan yang beraliran liberalis. Vietnam Utara berhasil menguasai Selatan dan menyatukan negara dibawah sistem pemerintahannya dengan menggunakan kekuatan dan kekerasan. Korut menginginkan unifikasi melalui skenario ini. Perang Korea 1953 pecah karena Kim Il-Sung menginginkan reunifikasi melalui perang. Korut merupakan negara yang mengutamakan militer dalam negaranya. Namun, skenario ini bukan pilihan utama bagi Korsel yang selama ini selalu berinisiatif melakukan perundingan antar-Korea.

Reunifikasi ini dapat terjadi jika hubungan bilateral antar- Korea benar-benar terputus. Sehingga, segala friksi dan konflik yang terjadi antar kedua negara tidak dapat diselesaikan dengan dialog. Selain itu, skenario ini juga bisa terjadi jika Amerika menginvasi Korut dengan alasan pengembangan nuklir dan misil Korut mengancam perdamaian dunia, seperti ketika Amerika menginvasi Irak pada tahun 2003 dengan tujuan resmi untuk melucuti senjata pemusnah masal. Namun, skenario ini mempunyai dampak yang luar biasa, tidak hanya bagi Korea namun bagi kawasan dan internasional. Adanya *four great powers* yang memiliki kepentingan dan pengaruh di Semenanjung Korea dapat menciptakan ketidakstabilan keamanan dunia internasional jika terjadi Perang Korea ke dua.

Walaupun mempunyai dampak yang besar terhadap dunia internasional, skenario ini mungkin terjadi di Semenanjung Korea namun dengan tingkat kemungkinan yang sangat kecil diantara ketiga skenario lainnya. Korut memang merupakan negara yang militeristik dan agresif. Namun, kedua negara pernah merasakan betapa perang sangat menghancurkan bagi negaranya. Cina yang menginginkan perdamaian dan stabilitas keamanan di Asia Timur mungkin akan menolak agresi Korut karena akan memberikan dampak buruk bagi Cina, tidak

hanya dalam bidang politik melainkan juga perekonomiannya. Selain itu, adanya pasukan PBB di garis parallel ke-38 dan DMZ untuk menjaga implementasi dan relevansi Perjanjian Gencatan Senjata membuat kemungkinan serangan maupun perang terbuka cukup minim. Kepentingan-kepentingan negara-negara lain yang menginginkan perdamaian dan stabilitas kawasan di Asia Timur juga akan memberikan pengaruh terhadap kebijakan mengenai isu Korea. Sehingga, keputusan untuk menyerang tidak hanya berdasarkan pertimbangan dari faktor internal melainkan juga pertimbangan faktor regional dan global.

### **3. *Unification by International Trusteeship (Perwalian Internasional)***

Unifikasi ini mengacu pada kesadaran untuk reunifikasi yang direalisasikan setelah masa transisi di bawah pengawasan internasional. Skenario ini pernah terjadi pada kasus Suriah ketika mengintervensi Perang Saudara di Libanon. Suriah mengintervensi Libanon atas permintaan tolong dari Presiden Libanon dan kemudian menguasai Libanon dibawah perjanjian. Libanon kembali mandiri setelah Suriah keluar dari Libanon. Skenario ini menggambarkan bahwa Korut mengalami krisis dalam negeri yang dapat menyebabkan pemimpin Korut mengambil langkah kebijakan konfrontasi. Kegagalan mengontrol krisis tersebut dapat menggoyahkan politik dalam negeri dan pemerintahan yang dapat menghasilkan ketidakstabilan karena berbagai tekanan sosial dan politik. Dalam situasi tersebut, kondisi dimana Korut diambang keruntuhan. Untuk mengatasi masalah dan situasi tersebut, pihak oposisi dapat mengundang intervensi pihak asing untuk masuk ke Korut sebagai pasukan perdamaian atau Korut meminta bantuan ekonomi menghindari potensi runtuh .

Ada kemungkinan yang akan dilakukan oleh Korut. Korut mengundang intervensi PBB atau Amerika akan meminta legalisasi PBB untuk mengintervensi Korut. Intervensi Amerika memang sulit terwujud jika melihat arah politik Korut selama ini, namun kemungkinan ini tidak dapat dihiraukan karena Amerika bisa saja bergerak atas nama PBB, seperti ketika Amerika mengintervensi Perang Korea dengan legitimasi UNC. Namun, Cina dapat menggunakan hak veto-nya atas tindakan Amerika tersebut. Sehingga, kemungkinan intervensi paling mungkin adalah oleh Cina. Hal ini dikarenakan beberapa alasan seperti kedekatan geografis dan historis dengan Korut serta selama ini Cina merupakan pemberi bantuan terbesar kepada Korut (Moon dan Lee 1998, 26). Selain itu, Cina

mempertimbangkan bahwa runtuhnya Korut akan berdampak bagi Cina, terlebih jika PBB atau Amerika mengintervensi Korut akan mengganggu politik dan keamanan Cina. Kemudian Cina akan masuk ke Korut dengan pasukan militer perdamaian dan mempengaruhi rezim Korut yang akan membentuk pemerintahan baru yang pro-Cina.

Intervensi Cina melalui pasukan perdamaian dapat menciptakan perwakilan atau perwalian jangka panjang oleh Cina atas Korut, seperti yang terjadi pada kasus Suriah. Jika skenario tersebut dapat terjadi, reunifikasi dapat tercipta setelah periode transisi dari masa intervensi Cina di Korut tanpa mengesampingkan faktor kembali stabilnya politik dalam negeri Korut, pulihnya ketertiban sosial dan terciptanya pemerintahan yang damai. Namun, menurut Jonathan D. Pollack, skenario ini akan menghasilkan '*deadlock*' baru jika perwalian dilaksanakan karena pengambilalihan Korut oleh Cina justru akan membawa Korut menjadi bagian dari Cina dan reunifikasi Korea akan semakin sulit terwujud akibat perdebatan mengenai status politik Korut (Pollack 1999,79).

#### **4. *Unification by Consensus* (Konsensus)**

Unifikasi ini berdasarkan konsensus bersama kedua negara. Asumsinya, selama masa konsensus dan negosiasi, Korut dan Korsel tetap mempertahankan *status quo* yang berdiri sebagai sebuah negara yang independen. Skenario ini tengah diupayakan oleh kedua Korea melalui dialog antar-Korea. Dalam skenario konsensus berarti kedua Korea harus menemukan formula reunifikasi yang disepakati oleh kedua belah pihak melalui integrasi bertahap. Integrasi dan konsensus untuk menuju reunifikasi damai berarti kedua Korea membutuhkan pengertian dan persamaan persepsi mengenai reunifikasi, termasuk sudut pandang politik dan mengesampingkan permusuhan serta menghilangkan perbedaan ideologi. Selain itu, kedua Korea juga harus menghilangkan ketegangan militer dan melakukan perjanjian damai agar terwujud dan membentuk Korea-bersatu.

Untuk mewujudkan reunifikasi melalui konsensus, kedua Korea dapat menggunakan atau memaksimalkan dialog-dialog yang selama ini telah dijalankan untuk menuju proses integrasi yang dapat mengantarkan kepada pencapaian reunifikasi Korea. Selama negosiasi, masing-masing Korea telah menghasilkan beberapa proposal strategi reunifikasi yang diharapkan dapat disetujui oleh kedua belah pihak. Korsel sudah lama mengupayakan kebijakan politik reunifikasi dengan

konsensus bersama. Reunifikasi dapat terjadi jika kedua negara dapat menemukan identitas nasional yang sama seperti ketika menjadi entitas tunggal sebelum terpecahnya Korea. Dalam proses dialog dan negosiasi, kedua negara harus memandang satu sama lain sebagai saudara yang terpisah dan berupaya untuk bersatu, bukan sebagai musuh seperti ketika Perang Korea. Kedua negara harus melaksanakan integrasi dan rekonsiliasi yang diinginkan kedua negara. Peran sosial masyarakat kedua negara juga harus berkontribusi untuk mempunyai pandangan yang sama mengenai kesamaan identitas dan satu Korea untuk tidak terjadi krisis sosial antara kedua negara jika bereunifikasi.

Proses reunifikasi dengan konsensus tidak dapat menciptakan proses reunifikasi yang cepat, namun dapat memberikan kesempatan kepada kedua Korea untuk terus melakukan dialog dan mengkaji formula reunifikasi yang tepat. Walaupun, besar kemungkinan akan terjadi *'deadlock'* dalam prosesnya mengingat pandangan, kebijakan dan kepentingan yang diinginkan sangat berbeda antara kedua Korea. Namun dari segala kemungkinan yang ada, skenario ini adalah hal yang paling mungkin untuk mewujudkan reunifikasi damai.

## **5. Pengaruh Politik Luar Negeri *Four Great Powers* Terhadap Dinamika Hubungan Korut-Korsel**

### **1. Jepang**

Politik luar negeri Jepang terhadap Semenanjung Korea adalah *two-Koreas policy* atau kebijakan 'dua Korea' yaitu dimana Jepang menerima kenyataan bahwa memang ada perpecahan di Semenanjung Korea dan melonggarkan komitmen Jepang yang mengakui Korsel sebagai satu-satunya pemerintahan Korea yang sah, serta dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua Korea yang berdasarkan kebijakan *'equidistance'* (seimbang) (Hughes 1999,60). Jepang tetap memprioritaskan hubungannya dengan Korsel, di sisi lain Jepang juga mengakui eksistensi pemerintahan Korut. Kebijakan luar negeri Jepang terhadap Semenanjung Korea sangat dipengaruhi oleh Perang Dingin dan kerjasama pertahanan Jepang-Amerika. Walaupun Amerika tidak terlibat langsung dalam proses kebijakan Jepang, tetapi posisi Amerika tetap menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan Jepang karena Amerika berperan menjaga keamanan nasional Jepang.

Kebijakan Jepang terhadap reunifikasi Korea juga dipengaruhi oleh dilema kepentingan nasional bagi Jepang. *Status quo* di Semenanjung Korea mempunyai dilemma bagi Jepang karena perpecahan Korea itu sendiri tetap menjadi faktor yang mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur yang dapat berdampak pada keamanan nasional Jepang. Namun, di sisi lain, reunifikasi Korea dapat menjadi faktor penting yang mengancam keamanan nasional Jepang, karena kekuatan ekonomi Korsel dan kekuatan militer Korut menjadi satu dengan sentimen anti-Jepang dapat membahayakan Jepang.

Strategi penyelesaian konflik Korea yang cocok dengan kepentingan nasional Jepang adalah skenario *unification by consensus*. Kepentingan nasional Jepang dalam isu Korea adalah perdamaian di Semenanjung Korea sehingga terciptanya stabilitas keamanan di Asia Timur demi terjaganya keamanan nasional Jepang. *Unification by consensus* dapat memenuhi kepentingan nasional Jepang yang menjunjung tinggi perdamaian dan stabilitas kawasan.

Peran yang dapat dilakukan oleh Jepang untuk menciptakan reunifikasi dengan konsensus yaitu meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Korut karena Jepang tidak bisa mengakui Korut secara diplomatik akibat terbentur aliansi Jepang-Amerika. Jepang dapat melakukan kerjasama yang dapat meningkatkan kepercayaan Korut terhadap Jepang. Kedekatan Korut dengan Cina tidak dapat dihiraukan karena Cina memiliki pengaruh sangat besar kepada Korut. Jepang dapat membangun korporasi kerjasama bersama antara Cina-Jepang-Korut. Diharapkan, kerjasama tersebut dapat meningkatkan kedekatan Jepang dengan Cina-Korut serta membuka pandangan dan kebijakan kedua negara tersebut terhadap reunifikasi. Disamping itu, masa depan reunifikasi yang menguntungkan Jepang membutuhkan kerjasama antara Jepang, Korsel dan Amerika.

## 2. Cina

Tujuan kepentingan nasional Cina adalah perdamaian, keamanan, dan stabilitas khususnya di Asia, peningkatan pembangunan, dan reunifikasi Taiwan dengan Cina daratan (Qimao 1993,59-79). Cina menginginkan menjaga *status quo* meskipun enggan mengakui, Cina sangat nyaman dengan keberadaan pasukan Amerika di Jepang dan Korsel karena eksistensi mereka menjaga *status quo* dimana Korut yang bergantung dengan Cina (Wortzel 1999,233).

Semenjak normalisasi hubungan Cina-Korsel, Cina telah menjaga kebijakan '*equidistant*' (keseimbangan) terhadap kedua Korea dengan memelihara hubungan politik dan ideologi dengan Korut dan meningkatkan hubungan ekonomi dengan Korsel secara bersamaan (Han 2004,13). Pasca Perang Dingin, internasionalisasi Korea terhadap dunia internasional mengubah orientasi politik dan meningkatnya regionalisasi dan interdependensi di Asia Timur, kemudian Cina menerapkan kebijakan '*two-Korea policy*'. Hubungan ekonomi Korsel dari hubungan ekonomi biasa menjadi hubungan strategis. Walaupun Cina tetap menjadi aliansi penting dan juga mitra dagang terbesar Korut, sumber investasi, minyak dan bantuan makanan. Cina merupakan satu-satunya negara yang mempunyai hubungan *high level politics* dengan Korut. Intervensi Cina di Perang Korea dan kebijakan-kebijakan Cina terhadap Korut menjelaskan bagaimana Cina sangat memandang Korut sangat penting secara strategis dari bidang keamanan maupun ekonomi-politik. Korut tidak hanya menjadi zona penyangga yang strategis (*strategic buffer zone*) tapi juga sebagai arena politik bagi memperjuangkan identitas nasional Cina sebagai negara yang hebat.

Cina menginginkan reunifikasi Korea yang damai melalui rekonsiliasi dan kooperasi karena Cina ingin perdamaian di Semenanjung Korea demi terciptanya keamanan nasional bagi Cina dan keberlangsungan pertumbuhan ekonomi Cina. Walaupun Cina mendukung reunifikasi, Korea-bersatu dibawah dominasi Korsel dapat memberikan ketidakpastian dan gangguan terhadap Cina, sehingga Cina lebih suka reunifikasi berlangsung secara bertahap dan baik ke masa depan (Roy 2004,2). Reunifikasi tersebut harus dicapai secara damai dan independen yang datang dari keinginan pihak kedua Korea itu sendiri dengan meminimalisir adanya intervensi dari pihak luar selain kedua Korea tersebut. Reunifikasi yang seperti diinginkan oleh Cina tersebut sesuai dengan kriteria *unification by consensus*.

Untuk mewujudkan reunifikasi yang diinginkan, Cina harus memainkan peranan dalam konflik internasional. Cina dapat menjadi mediator yang adil antara negara yang berkonflik, dan mencurahkan fokusnya ke regional ekonomi dan kepentingan keamanan (Lee 2011,3). Cina sangat diuntungkan dengan posisi dimana memiliki pengaruh terhadap Korut dan hubungan baik dengan Korsel. Cina dapat menggunakan posisi tersebut guna memberikan ruang bagi kedua Korea untuk melakukan dialog damai. Cina bisa menggunakan forum *SixParty Talks* atau membentuk forum baru *Four Party Talks* (dua Korea, Amerika, dan

Cina). *Four Party Talks* dapat dilakukan seperti *Four Power Talks* (Inggris, Uni Soviet, Perancis, Amerika) lakukan ketika Perang Dingin mengenai status Berlin (Jerman) yang kemudian memberikan kontribusi penting pada reunifikasi Jerman.

### 3. Amerika Serikat

Amerika Serikat sebagai negara hegemoni memiliki kepentingan yang luas tidak hanya di tingkat kawasan, tapi juga tingkat global. Salah satu cara untuk pemenuhan kepentingan nasional Amerika adalah stabilitas keamanan di Asia Timur. Pasca Perang Dingin, Amerika tetap melihat Semenanjung Korea sebagai geostrategis pertahanan Amerika dan menginginkan *balance of power* di Asia Timur lebih condong ke Amerika. Kepentingan keamanan Amerika di Semenanjung Korea yaitu menjaga aliansi dengan Korsel untuk mencegah serangan Korut dan mendukung upaya rekonsiliasi Korsel.

Amerika menjalankan kebijakan politik luar negeri terhadap Semenanjung Korea dalam perilaku yang mendukung namun berupaya untuk menciptakan reunifikasi yang menguntungkan Amerika melalui aliansi pertahanannya dengan Korsel. Amerika mendukung secara resmi objektivitas reunifikasi Korea. Amerika dan Korsel ingin membangun masa depan yang baik bagi Semenanjung Korea melalui aliansinya dengan menciptakan perdamaian yang abadi di Semenanjung Korea serta mengupayakan reunifikasi damai yang membawa nilai-nilai kebebasan demokrasi dan ekonomi pasar bebas. Dengan kata lain bahwa Amerika menginginkan Korea-bersatu yang stabil, demokratis, dan mempunyai pasar bebas yang berkiblat ke Amerika.

Keinginan Amerika yang berharap reunifikasi Korea dapat diraih dengan cara-cara damai, maka skenario reunifikasi yang mendukung bagi Amerika adalah *unification by consensus* atau reunifikasi dengan konsensus. Selain itu, konsensus dapat mendukung kepentingan Amerika yang menginginkan reunifikasi Korea yang pro-Amerika. Melalui konsensus maka Amerika dapat memperkuat pengaruhnya terhadap Asia Timur dan Semenanjung Korea selama *status quo* yaitu masa dialog untuk rekonsiliasi dan kooperasi. Sehingga, jika reunifikasi Korea terwujud, Korea-bersatu akan menjadi Korea yang pro terhadap Amerika.

Dengan aliansi militer bersama Korsel dan Jepang sebagai basis pertahanan Asia, Amerika juga memperoleh keuntungan dari pertumbuhan ekonomi Asia Timur dan perdagangan bebas di kawasan. Pemerintahan Obama mengumumkan pada pertengahan 2011 bahwa kebijakan luar negerinya akan fokus ke Asia

dengan slogan "*Pivot to Asia*" yang artinya 'Berporos ke Asia'. Alasannya karena pertumbuhan Cina mengarah menjadi negara adidaya serta pengaruh dari pertumbuhan Australia, India, Korea dan para anggota ASEAN pada pertumbuhan ekonomi global. Dapat dikatakan bahwa politik luar negeri Amerika di Semenanjung Korea merupakan sebuah *grand strategy* yang tidak hanya untuk mempertahankan kekuatan (*power*) Amerika di Korsel terhadap isu konflik Korea, tapi juga *power* di kawasan dan tingkat global dimana Amerika merupakan negara adidaya.

Untuk itu, pengaruh Amerika di kawasan Asia Timur harus tetap kuat dengan menjaga pengaruh di Korsel dan kehadiran Amerika di Semenanjung Korea. Caranya adalah dengan meningkatkan hubungan aliansi Amerika-Korsel dan Amerika-Jepang. Amerika harus berperan aktif membantu Korsel dalam menghadapi isu global dan membantu memecahkan permasalahan-permasalahannya. Amerika dan Korsel mempunyai misi untuk mengeleminasi senjata nuklir dan rudal Korut dengan dapat meningkatkan kepedulian terhadap kemanusiaan dan hak asasi manusia di Korut. Disamping fokus pada kedua Korea, Amerika juga harus meningkatkan dialog-dialog yang lebih baik dengan ketiga negara lainnya, Jepang, Cina, dan Rusia karena ketiga negara tersebut juga mempunyai pengaruh di Semenanjung Korea.

Peran yang dapat dilakukan oleh Amerika untuk menciptakan reunifikasi damai adalah menetapkan kebijakan dan strategi termasuk diantaranya membentuk forum atau dialog-dialog yang dapat mengakomodir kepentingan kedua Korea. Permasalahan utama Amerika terhadap Korut adalah adanya senjata nuklir di Korut yang dapat mengancam dunia internasional. Selama Korut memiliki senjata nuklir dan tidak menandatangani NPT, Amerika akan tetap menjalankan *hostile policy* terhadap Korut sehingga akan sulit untuk terjadi reunifikasi. Salah satu yang dapat dilakukan adalah melakukan kerjasama nuklir dengan Korut seperti yang Amerika lakukan dengan India. India merupakan negara yang memiliki senjata nuklir dan tidak menandatangani NPT, kasusnya hampir mirip dengan Korut. Namun, Amerika melakukan perjanjian kerjasama nuklir dengan India. Hal ini dapat dilakukan terhadap Korut untuk meningkatkan dialog dan kepercayaan Korut. Kemudian, Amerika dapat meningkatkan kerjasama ekonomi dengan Korut bersama-sama dengan atau melalui Korsel agar *closed door policy* Korut menjadi lebih terbuka kepada dunia internasional. Sehingga,

sistem di Korut akan terjadi perubahan dan memberikan signifikansi terhadap reunifikasi karena tanpa peran aktif dan perubahan sistem di Korut, reunifikasi akan sulit tercapai.

#### 4. Rusia

Sebagai negara bekas Uni Soviet yang mempunyai peran dalam memecah Semenanjung Korea menjadi dua dan secara geografis berbatasan sepanjang 18 kilometer dengan Semenanjung Korea pada Sungai Tumen. Rusia juga memiliki sejarah panjang dengan Semenanjung Korea. Sehingga, Rusia mempunyai kepentingan dalam masa depan Korea. Rusia ingin menjaga hubungan dengan kedua Korea. Korea sudah menjadi elemen geostrategis yang penting bagi kepentingan nasional Rusia. Faktor kepentingan nasional Rusia di Korea yang paling utama adalah ekonomi, geopolitik dan strategi.

Setelah runtuhnya Uni Soviet dan berubah menjadi Rusia, Rusia mengalami transformasi politik. Sehingga, politik luar negeri Rusia berubah dari pro-Korut menjadi pro-kebijakan Korsel. Kebijakan Rusia terhadap Semenanjung Korea ditentukan oleh kebijakan politiknya terhadap Korsel dan Korut diabaikan (Joo 2003,142). Namun, tidak dapat dikatakan bahwa Rusia telah kehilangan kepentingan di Korut, sehingga bukan berarti hubungan dihilangkan karena keduanya memiliki keterikatan sejarah (Wishnick 2002,146). Walaupun, hubungan Rusia dan Korut sekarang lebih pragmatis, namun Rusia tetap mempertahankan kedekatan politik dan kerjasama ekonomi dengan Korut untuk menjaga pengaruh di Korut sebab tanpa mempertahankan pengaruh akan memberikan dampak buruk pada Rusia terhadap hubungan dengan Korut itu sendiri maupun Korsel. Oleh karena itu, Rusia menjalankan kebijakan *equidistant* (keseimbangan) kepada kedua Korea.

Pasca Gorbachev, kebijakan Rusia terhadap Asia Timur adalah menciptakan lingkungan yang bersahabat di Asia Timur (Ha 1999,24). Pada akhir masa rezim Gorbachev dan kemudian Yeltsin, ideologi menjadi semakin tidak relevan dan tidak sesuai dengan jaman, kalkulasi geostrategi menjadi urutan kedua dalam kebijakan Rusia terhadap Korea, sedangkan kepentingan ekonomi menjadi pertimbangan utama dalam hubungan Rusia dengan kedua Korea (Wishnick 2002,147). Ideologi bukan lagi faktor pertimbangan dalam kebijakan dan politik luar negeri Rusia terhadap Korea (Joo 2003,142). Sekarang ini, khususnya pada pemerintahan Putin, Rusia mengambil langkah pragmatis dan penuh perhitungan

demikian keseimbangan hubungan dengan kedua Korea untuk merumuskan politik luar negeri Rusia terhadap Korea guna mencapai kepentingan geopolitik dan ekonomi Rusia (Takeda 2006,189).

Pada jangka panjang, Rusia melihat reunifikasi sebagai kesempatan untuk mengembalikan relevansi kekuatan strategis Rusia di kawasan dan memperoleh keuntungan ekonomi. Pada intinya Rusia mendukung reunifikasi Korea atas dasar keputusan kedua Korea dan tidak didominasi pengaruh dan keputusan dari pihak luar serta mendukung reunifikasi yang mengakomodasi kepentingan Rusia, khususnya di kawasan. Elemen politik luar negeri Rusia terhadap Semenanjung Korea selain dari kepentingan terhadap kedua Korea, kebanyakan juga merupakan hasil dari hubungan dengan tiga negara besar lainnya, yaitu Jepang, Cina, dan Amerika (Joo 2003,142). Rusia bersama dengan Jepang, Cina, dan Amerika merupakan negara dengan tingkat perekonomian tinggi dan pasar besar yang dapat memberikan keuntungan bagi Rusia. Maka dari itu, Rusia mendukung Reunifikasi Korea yang tidak mengancam keberlangsungan maupun prospek ekonominya, khususnya dalam ekspor minyak dan gas alam.

Rusia menginginkan perdamaian dan stabilitas kawasan di Asia Timur dan keamanan di Semenanjung Korea demi keamanan nasionalnya dan tujuan ekonominya. Skenario reunifikasi yang cocok dan diinginkan oleh Rusia adalah *unification by consensus* atau reunifikasi melalui konsensus. Seung-Hoo Joo menjelaskan bahwa Rusia menginginkan proses tahap demi tahap menuju reunifikasi Korea yaitu dengan hidup berdampingan secara damai sebelum meraih reunifikasi, Korsel maupun Amerika tidak boleh mencoba mengubah perilaku Korut atau mengupayakan agar Korut runtuh, reunifikasi harus dicapai melalui cara-cara damai, serta kedua Korea harus bernegosiasi mengenai reunifikasi damai dengan dasar kedudukan yang setara (Joo 2003,142).

Rusia yang memiliki sejarah langsung dengan Korea dapat memberikan peran untuk mewujudkan reunifikasi damai. Rusia dapat mengembalikan pengaruh masa lalunya secara ekonomi politik kepada Korut. Rusia dapat memainkan peran hubungan tradisional dengan Korut untuk menyelesaikan masalah nuklir Korut. Peran Rusia dapat lebih realistis daripada Amerika yang dianggap menjalankan *hostile policy* dan memaksa Korut mendenuklirisasi negaranya. Jika Amerika dari awal sudah merupakan musuh Korut, lain halnya dengan Rusia. Sehingga, Rusia dapat meningkatkan pengaruh negaranya dengan

mempromosikan perdamaian di Korut. Jika langkah tersebut berhasil, Rusia tidak hanya berhasil memberikan kontribusi kepada kawasan melainkan juga kepada dunia internasional. Sehingga, Rusia selangkah lebih maju untuk mengembalikan status negaranya sebagai negara adidaya seperti ketika masih menjadi Uni Soviet dan dapat berkontribusi mewujudkan reunifikasi damai.

## **6. Masa Depan Reunifikasi Korea**

### **1. Implikasi Pengaruh dan Kepentingan Tingkat Internal (Antar-Korea) Terhadap Masa Depan Reunifikasi Korea**

Pada tingkat internal, yaitu dinamika hubungan antar-Korea dan masa depan reunifikasi Korea akan tergantung kepada kepentingan nasional masing-masing Korea dan juga melalui konvergensi kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi oleh empat negara besar lainnya, yaitu Jepang, Cina, Amerika Serikat, dan Rusia. Keempat negara tersebut sudah memberikan pengaruh politik luar negerinya dalam dinamika hubungan Korea Utara dan Korea Selatan pada masa Perang Dingin maupun pasca Perang Dingin.

### **2. Implikasi Pengaruh dan Kepentingan Tingkat Regional (Jepang dan Cina) Terhadap Masa Depan Reunifikasi Korea**

Pada tingkat regional, masa depan reunifikasi Korea dipengaruhi oleh pengaruh dan kepentingan Jepang dan Cina terhadap Semenanjung Korea melalui politik luar negeri dan kebijakan-kebijakan mereka terhadap reunifikasi Korea. Walaupun Jepang dan Cina memiliki kepentingan yang berbeda-beda sesuai dengan tujuan nasionalnya, namun Jepang dan Cina beserta kedua Korea akan saling melakukan tawar menawar untuk melakukan koordinasi strategi dan berupaya mencari kesepakatan mengenai tujuan-tujuan bersama yaitu menciptakan keamanan regional demi memenuhi keamanan nasional dan menjaga kepentingan masing-masing.

### **3. Implikasi Pengaruh dan Kepentingan Tingkat Global (Amerika Serikat dan Rusia) Terhadap Masa Depan Reunifikasi Korea**

Pada tingkat global, masa depan reunifikasi Korea dipengaruhi oleh pengaruh dan kepentingan Amerika Serikat dan Rusia terhadap Semenanjung Korea melalui politik luar negeri dan kebijakan-kebijakan mereka terhadap reunifikasi Korea. Amerika Serikat dan Rusia sebagai negara adidaya yang berperan terhadap perpecahan Korea tidak lagi hanya melihat Semenanjung Korea sebagai suatu wilayah yang

mengakomodir perluasan pengaruh ideologi seperti ketika Perang Dingin. Perebutan pengaruh antara Amerika dan Rusia tidak lagi menggambarkan blok-blok ideologi. Kepentingan keamanan dan ekonomi strategis kawasan dan Semenanjung Korea merupakan faktor utama perebutan pengaruh kedua negara pasca Perang Dingin. Strategi-strategi pun dijalankan demi harmonisasi kepentingan negara masing-masing dengan negara lainnya untuk terciptanya kawasan yang stabil dan damai.

### C. PENUTUP

Reunifikasi atau unifikasi nasional adalah penggabungan dua atau lebih negara yang memiliki kesamaan etnis identitas nasional dan percaya bahwa negara mereka dulunya pernah bersatu sebagai entitas politik tunggal. Dengan pengertian lain, reunifikasi merupakan integrasi institusi pemerintahan, fungsi, dan otoritas dari dua pemerintah menjadi satu. Reunifikasi damai membutuhkan kerjasama dari kedua negara yang terkait. Negosiasi integrasi dimana dua negara menyesuaikan kepentingan dan tuntutan yang berbeda, menjaga dan mengkoordinasi perilaku mereka, serta masing-masing membuat akomodasi untuk membentuk pemerintahan bersama atas kedua negara. Korea Utara dan Korea Selatan sama-sama menginginkan terwujudnya reunifikasi nasional.

Situasi di Semenanjung Korea tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika hubungan antar-Korea. Pada kenyataannya, Korea dilihat dari sudut pandang tinjauan historis maupun teoritis, posisi empat negara besar lainnya atau *four great powers* (Amerika, Jepang, Cina, dan Rusia) yang mampu memberikan pengaruh terhadap Semenanjung Korea menjadi sangat penting sepenting posisi kedua Korea. Dinamika hubungan Korea Utara dan Korea Selatan termasuk didalamnya tindakan mengupayakan reunifikasi damai Korea tidak hanya dipengaruhi oleh internal antar-Korea, namun juga dipengaruhi oleh kawasan Asia Timur dan global yaitu oleh *four great powers* melalui politik luar negeri mereka terhadap Semenanjung Korea dan kebijakan mereka terhadap reunifikasi Korea. Hal-hal tersebut berdampak kepada konstataasi dan konstelasi serta stabilitas keamanan kawasan Asia Timur yang kemudian akan memberikan pengaruh dan implikasi kepada masa depan reunifikasi Korea.

Asia Timur memiliki faktor geopolitik tinggi dan di dalamnya terdapat Semenanjung Korea yang memiliki keunikan faktor geostrategis dan geopolitik. Maka formulasi kebijakan reunifikasi maupun skenario atau strategi penyelesaian konflik Korea tidak hanya harus dapat diterima oleh kedua Korea namun juga keempat negara

besar lainnya yang mempunyai kepentingan di Semenanjung Korea untuk menghindari implikasi negatif terhadap kawasan Asia Timur dan global. Hal ini mengingat bahwa bahkan dari semenjak perpecahan Korea, konflik tersebut sudah melibatkan banyak negara-negara tersebut dalam sejarahnya.

Kedua Korea dapat memajukan kerjasama ekonomi di kawasan industri Gaesong untuk meningkatkan *economic linkage* dan hubungan bilateral diantara kedua Korea. Suatu strategi ekonomi yang dapat meluas ke aspek lainnya, seperti sosial dan budaya, terutama politik. Disamping meningkatkan kerjasama ekonomi di kawasan industri Gaesong untuk tingkat internal antar Korea. *Four Party Talks* (Korea Utara, Korea Selatan, Cina, dan Amerika) maupun *Six Party Talks* (Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Jepang, Amerika, dan Rusia) juga dapat dimaksimalkan sebagai alat atau sarana untuk menciptakan reunifikasi damai yang dapat menguntungkan berbagai pihak yang terlibat. Proses menuju reunifikasi damai yang melalui rekonsiliasi dan kooperasi oleh kedua Korea demi terciptanya stabilitas keamanan di kawasan Asia Timur dan keamanan internasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Armstrong, Charles K. (2005). "Inter-Korean Relations in Historical Perspective". *International Journal of Korean Unification Studies*, Vol. 14 No.2.
- Armstrong, Charles K.,dkk (Ed).(2006).*Korea at The Center : Dynamics of Regionalism in Northeast Asia*.Amerika : M.E. Sharpe Inc.
- Buzan, Barry (1991). *People, States, and Fear: An Agenda for International Security Studies in Post-Cold War Era*. Amerika: Harvester Wheatsheaf.
- Choi, Jin-Wook. (1995). "Inter-Korean Economic Cooperation: A Vital Element of Seoul's Unification Policy". *The Korean Journal of National Unification*, Vol. 4.
- Couloumbis, T.A & James H.W. (1990).*Pengantar hubungan Internasional: Keadilan dan Power*. Bandung: Abardin.
- Ha, Yong-Chool, 1999, "Engaging Russia for Peace in Northeast Asia", *Engaging Russia in Asia Pacific*, Kōji Watanabe (Ed), Singapura: Institute of Southeast Asian Studies,
- Han, Sukhee. (2004). "Korean Perceptions of China's Rise in East Asia", *Korea in the New Asia: East Asian Integration and the China Factor*. Amerika:Routledge,
- Han, Yong-Sup. (1995). "Breaking off the Cold War Chains on the Korean Peninsula: The Relevance of Arms Control Measures".*International Journal of Korean Unification Studies*, Vol.4.
- Hara, A.B.E. (2011). *Pengantar Analisa Politik Luar Negeri: Dari Realism Sampai Konstruktivisme*, Bandung: Penerbit Nuansa.
- Hettne, B. dan Soderbaun. (1998). "The New Regionalism Approach" dalam *Special Issue of Politea*, Vol. 17 No.3.
- Ho, Khai Leong (Ed). (2007). *ASEAN-Korea Relations: Security, Trade, and Community Building*. Singapore: ISEAS Publishing Institute of Southeast Asian Studies.
- Holsti, K.J. (1998). *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis Jilid I*. Jakarta: Erlangga.
- Hughes, Christopher W. (1999) *Japan's Economic Power and Security: Japan and North Korea*. Amerika: Routledge.
- Hwang, Eui-Gak. (2013). "Prospects of the inter-Korean Economic Cooperation And North Korean External Trade".*International Journal of Korean Studies*, Vol.17 No.2.
- Jeffries, Ian. (2013). *North Korea 2009-2012: A Guide to Economic and Political Developments*. New York: Routledge.

- Joo, Seung-Ho & Tae-Hwan Kwak (Ed).(2010). *Peace Regime Building on the Korean Peninsula and Northeast Asian Security Cooperation*. Amerika: Ashgate.
- \_\_\_\_\_. (2003). *The Korean Peace Process and the Four Powers*. Amerika: Ashgate.
- Kim, Yong-Ho. (2011). *Korean Foreign Policy: Security Dilemma and Succession*. Inggris: Lexington Books.
- Kriesberg, Louise (1994). *World Security: Challenges for a New Century*. Amerika: St.Martin.
- Lee, Hochul. (Oktober, 2011). "China's Peace Equation: Rising China and Security in East Asia". *Peace in Korean Peninsula and Sino-US Relations*, Center for Korean Studies.
- Mansbach, R. W. dan Kirsten L.R. (2012). *Pengantar Politik Global*. Bandung: Nusa Media.
- Mas' oed, Mohtar (1990). *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*. Jakarta: LP3ES.
- Morgenthau, H.J. (2010). *Politik Antar Bangsa*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Munakata, Naoko. (2006). *Transforming East Asia: The Evolution of Regional Economic Integration*. Amerika: Brookings Institution Press.
- Nye, Joseph (2002). *Regionalism in World Politics*. Inggris: Oxford University Press.
- Perwita, A.A.B & Yanyan M.Y. (2006). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pollack, Jonathan. D & Chungmin Lee. (1998). *Preparing for Korean Unification: Scenarios and Implications*. Amerika: RAND.
- Roy, Denny.(Januari, 2004). "China and the Korean Peninsula: Beijing's Pyongyang Problem and Seoul Hope". *Asia-Pasific Center for Security Studies, Vol. 3 No.1*.
- Rozman, Gilbert.(2004). *Northeast Asia's Stunted Regionalism: Bilateral Distrust in the Shadow of Globalization*. Inggris: University of Cambridge.
- Sitepu, P.A. (2011). *Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Snyder, C.A. (2008). *Security and Strategy*. Palgrave: Macmillan.
- Sukanta, HM. (2007). *Konflik Tak Berujung: Mengupas Konflik dan Interdependensi Mesir-Sudan dalam Perspektif Teori Hubungan Internasional.*, Bandung: Teraju.
- Suparman, Nuraeni, dkk. (2010). *Regionalisme Dalam Studi Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Takeda, Yoshinori. (2006). "Putin's Foreign Policy Toward North Korea". *International Relations of the Asia-Pacific, Vol. 6*.

- Weissmann, Mikael. (2009). "Understanding the East Asian Peace: Informal and formal conflict prevention and peacebuilding in the Taiwan Strait, the Korean Peninsula, and the South China Sea 1990-2008". Disertasi. Swedia: School of Global Studies-University of Gothenburg.
- Wishnick, Elizabeth. (2002). "Russian-North Korean Relations: A New Era?", *North Korea and Northeast Asia* oleh Samuel S. Kim dan Tai Hwan Lee (Ed), Amerika: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
- Worth, Richard. (2008). *Kim Jong Il*, Amerika: Infobase Publishing.
- Wortzel, Larry M. (Ed). (1999). *The Chinese Armed Forces in The 21st Century*. Amerika: US Army War College-Strategic Studies Institute.
- Qimao, Chen. (1993). *Korean Unification: Implications for Northeast Asia*. Amerika: CSIS.